KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR dalami masalah migor lewat panja
Tanggal : Rabu, 23 Maret 2022
Surat Kabar : Republika
Halaman : 3

DPR Dalami Masalah Migor Lewat Panja

Panja komoditas pangan akan bekerja dalam kurun waktu tiga pekan.

■ NAWIR ARSYAD AKBAR

JAKARTA — Komisi VI DPR resmi membentuk panitia kerja (panja) terkait permasalahan pangan, terutama minyak goreng, menjelang Ramadhan. Mereka tak membentuk panitia khusus (pansus) hak angket seperti yang diusulkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Panja untuk mendalami permasalahan minyak goreng, karena hal itu merupakan masalah yang harus diatasi oleh Menteri Perdagangan," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR Mohamad Hekal saat dihubungi, Selasa (22/3).

Ia menambahkan, pembentukan pansus hak angket kelangkaan dan mahalnya minyak goreng belum perlu dilakukan saat ini. Apalagi, menurut dia, pembentukannya justru dapat membuat kisruh di publik.

"Bukan menolak, tetapi memandang belum perlu, nanti tambah kisruh," ujar Hekal.

Komisi VI, kata Hekal, kecewa dengan penjelasan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi terkait langka dan mahalnya minya goreng. Pencabutan harga eceran tertinggi (HET) dan melepasnya sesuai mekanisme pasar juga dipertanyakan oleh pihaknya.

"Sangat memalukan bahwa setelah dibebaskan DMO (*domestic market obligation*), DPO (*domestic price obligation*), HET, dan PE (persetujuan ekspor) dalam kurang dari satu hari barang melimpah yang sebelumnya langka," ujar Hekal.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Gde Sumarjaya Linggih menyatakan, DPR terus bekerja untuk mengawasi perkembangan persoalan minyak goreng, termasuk kebijakan yang diambil pemerintah. Hal itu agar ke depan polemik tak kembali terjadi lewat keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

"Biarkan kami di komisi sedang bekerja, PKS juga punya perwakilan di panja, di Komisi VI. Biarkan kami bekerja, kemarin kami bekerja," ujar Sumarjaya lewat keterangan tertulisnya, Selasa (22/3).

Panja komoditas pangan dijelaskannya akan berkerja dalam kurun waktu tiga pekan ke depan. Hasilnya nanti akan disampaikan kepada Komisi VI untuk ditindaklanjuti terkait persoalan minyak goreng.

"Biarkan panja bekerja, nanti hasil panja apa, dilaporkan ke Komisi VI. Nanti Komisi akan menyikapi hal tersebut," ujar Sumarjaya.

Di samping itu, ia melihat masalah langkanya minyak goreng mulai teratasi dalam beberapa hari terakhir. Namun, ia meminta pemerintah melakukan pemerataannya di seluruh wilayah.

"Negara hadir dengan keadilan, dengan cara begitu baru adil. Kalau disubsidi semua, negara tidak adil, jadi merata memberi bantuannya, *kan* adil belum tentu merata. Bagi kami yang utama itu pemerintah harus adil di masyarakat," ujar politikus Partai Golkar itu.

Menanggapi usulan PKS, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, usulan tersebut akan dibahas dalam rapat tingkat badan musyawarah (bamus).

"Soal masalah pansus yang diusulkan, nanti kita akan bawa ke badan musyawarah. Di situ biasanya akan dibahas," ujar Dasco, Selasa (22/3).

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Kamis (17/3) pekan lalu, Mendag Muhammad Lutfi menegaskan, pemerintah tak menyerah terhadap permasalahan komoditas pangan saat ini, khususnya minyak goreng. Ia juga membantah, pemerintah telah kalah dengan pengusaha ketika mengeluarkan kebijakan-kebijakan.

"Jadi, bapak ketua (Komisi VI), kalau kita lihat ini sekarang, kalau ditanya 'apakah kita kalah dengan pengusaha?' tidak," kata Lutfi menegaskan.

■ **ed:** andri saubani

Baca juga
di **republika.id**
Pindai QR Code ini